

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara tingkat ketergantungan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, jumlah SKPD, ukuran legislatif, dan temuan audit BPK terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Periode penelitian diambil selama 3 tahun yaitu sejak tahun 2010-2012 dengan sampel seluruh Provinsi di Indonesia. Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tingkat ketergantungan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini disebabkan besar kecilnya Dana Alokasi Umum yang didapat Pemerintah Provinsi tidak berdasarkan banyaknya jumlah pengungkapan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Selain itu Pemerintah Pusat juga lebih berfokus terhadap opini yang didapat bukan terhadap tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
2. Rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Komponen utama rasio kemandirian dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima pemerintah provinsi. Semakin tinggi PAD di suatu Provinsi dapat menyebabkan pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab untuk

melakukan pengungkapan LKPD lebih lengkap sebagai salah satu wujud transparansi kepada masyarakat yang membayar pajak.

3. Jumlah SKPD memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini berarti semakin sedikit jumlah SKPD maka semakin banyak tingkat pengungkapan yang dilakukan dan sebaliknya. Semakin sedikit jumlah SKPD dapat membuat kegiatan pemerintah yang bersifat generik semakin sedikit, semakin sedikit kegiatan pemerintah maka semakin sedikit kompleksitas pemerintah provinsi, sehingga dapat menyebabkan pemerintah provinsi dapat lebih mengontrol kegiatan yang dilakukan SKPD sehingga dapat meningkatkan lengkapnya pengungkapan yang dilakukan pemerintah provinsi.
4. Ukuran Legislatif memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Jumlah anggota DPRD memiliki fungsi sebagai pengawas dan perantara antara rakyat dan pemerintah daerah. Semakin banyak jumlah anggota DPRD yang dimiliki oleh suatu Provinsi dapat membuat tekanan yang dilakukan DPRD kepada pemerintah provinsi untuk melakukan tingkat pengungkapan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan APBD.
5. Temuan audit BPK tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini disebabkan BPK hanya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi, sedangkan tindak lanjut atas temuan BPK tergantung kepada masing-masing Provinsi. Dengan demikian tidak

adanya tekanan yang dilakukan oleh BPK terhadap lengkapnya tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

B. Implikasi

Hasil temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa tingkat ketergantungan, dan temuan audit BPK tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD. Sementara rasio kemandirian keuangan daerah, jumlah SKPD, dan ukuran legislatif mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD. Implikasi dari penelitian ini, antara lain:

1. Tingkat ketergantungan terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Dengan adanya otonomi daerah membuat pemerintah pusat tidak intensif memberikan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat saat ini hanya sebatas terhadap opini yang didapat oleh pemerintah daerah. Seharusnya pemerintah pusat juga memberikan perhatian lebih terhadap tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena semakin lengkapnya pengungkapan yang dilakukan pemerintah daerah dapat menggambarkan akuntabilitas dan transparannya laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah.
2. Rasio kemandirian keuangan daerah terbukti memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan utama yang didapat oleh pemerintah provinsi. PAD yang cukup tinggi mengindikasikan bahwa masyarakat taat dalam membayar pajak dan retribusi. Masyarakat yang telah membayar pajak menuntut pemerintah

daerah untuk adanya transparansi menyangkut uang yang masyarakat telah keluarkan sehingga pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab untuk membuat pengungkapan yang lengkap sebagai bentuk transparansi laporan keuangan. Ketika pengungkapan yang dilakukan pemerintah daerah telah lengkap, maka masyarakat dapat melihat pertanggungjawaban uang masyarakat yang dikelola oleh pemerintah daerah.

3. Jumlah SKPD terbukti memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Meskipun berpengaruh ke arah yang negatif, SKPD memiliki peran dalam menjalankan kegiatan pemerintah daerah. Kegiatan SKPD di masing-masing Provinsi bersifat generik sehingga seharusnya tidak diperlukan jumlah SKPD yang lebih banyak antara provinsi satu dengan yang lainnya. Seharusnya pemerintah daerah lebih mementingkan kualitas dari suatu SKPD dibandingkan dengan kuantitasnya. Semakin berkualitas suatu SKPD dapat memberikan transparansi yang lebih baik dibandingkan kuantitas banyak namun tidak memiliki kualitas yang baik.
4. Ukuran legislatif terbukti memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. DPRD sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah memiliki tanggung jawab agar pemerintah daerah tetap menjalankan fungsi sesuai dengan apa yang telah direncanakan melalui rapat antara pemerintah daerah selaku badan eksekutif dan DPRD selaku badan legislatif. Selain itu DPRD juga memiliki fungsi sebagai perantara antara pemerintah daerah dan rakyat. Peran DPRD harus mengawasi pemerintah daerah yang menjalankan kegiatannya menggunakan uang yang berasal dari

rakyat. DPRD memberi tekanan kepada pemerintah daerah agar melakukan tingkat pengungkapan yang lengkap sebagai wujud transparansi pemerintah daerah.

5. Temuan Audit BPK terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. BPK sebagai lembaga yang melakukan audit BPK hanya sebatas memeriksa dan memberikan opini terhadap LKPD dan tindak lanjut temuan diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. BPK seharusnya memberikan tekanan kepada pemerintah daerah agar menindaklanjuti temuan supaya temuan audit yang ada pada tahun berjalan tidak kembali muncul pada tahun selanjutnya. Demikian juga kepada pemerintah daerah sebaiknya memiliki kesadaran untuk melakukan tindak lanjut terhadap temuan yang didapat BPK dengan melakukan pengungkapan LKPD yang lebih lengkap.

C. Saran Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti memiliki beberapa keterbatasan, dan saran yang peneliti sarankan antara lain:

1. Sampel penelitian terbatas pada 33 Provinsi di Indonesia, dan dalam periode 3 tahun (2010-2012). Sehingga hasil penelitian ini belum mewakili dan menggambarkan keadaan kinerja keuangan pemerintah daerah secara kompleks yang ada di Indonesia.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menjelaskan beberapa variabel pada karakteristik daerah, kompleksitas daerah, dan hasil audit BPK.

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada, maka saran yang dapat diberikan diantaranya adalah:

1. Bagi peneliti berikutnya :

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah tahun atau mengambil tahun yang berbeda, dalam pengamatan menjadi 3 tahun atau lebih sehingga hasil yang didapat maksimal.
- b. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan populasi menjadi seluruh Provinsi beserta Kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
- c. Pada variabel tingkat pengungkapan LKPD tidak hanya membandingkan butir pengungkapan dengan PSAP namun juga harus melihat pengungkapan tersebut mengandung arti dan memberikan perbandingan dengan kondisi yang sebenarnya.
- d. Pada variabel Temuan Audit BPK sebaiknya menggunakan proksi nominal penyimpangan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
- e. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain selain dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi Tingkat Pengungkapan LKPD seperti Kekayaan Daerah, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Penyimpangan.

2. Bagi Pemerintahan :

Peneliti mengharapkan adanya pengawasan yang lebih intensif yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta

pengawasan lebih diarahkan terhadap tingkat pengungkapan bukan hanya terkait opini yang didapat oleh pemerintah daerah saja. Untuk pemerintah daerah selanjutnya harus lebih mementingkan kualitas yang dimiliki oleh setiap SKPD dibandingkan dengan banyaknya kuantitas SKPD namun memiliki kualitas yang rendah. Selain itu, pemerintah daerah seharusnya memiliki kesadaran untuk melakukan tindak lanjut temuan audit dari BPK agar temuan audit yang muncul pada tahun berjalan tidak kembali muncul pada tahun selanjutnya, serta menerapkan tingkat pengungkapan yang lebih lengkap sebagai bukti akuntabilitas dan transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seharusnya memberi tekanan kepada pemerintah daerah untuk melakukan tingkat pengungkapan yang lebih lengkap ketika ditemukan banyaknya temuan audit BPK.